

**STUDI KOMPARASI PELINDUNGAN DEBITOR DALAM KEPAILITAN  
(STUDI PUTUSAN No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TELKOMSEL  
INDONESIA DAN CASE NO. 02-13533 (AJG) IN RE WORLD COM., ET AL  
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK AMERIKA SERIKAT)**

Berna Merinda Febi<sup>1</sup>, Tata Wijayanta<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan debitor dalam hukum pailit Indonesia jika dibandingkan dengan hukum pailit Amerika serta menganalisis serta menganalisis hakim dalam mengatasi kekosongan hukum berkaitan dengan insolvensi tes.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didukung wawancara narasumber. Data yang digunakan adalah sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Cara yang digunakan adalah metode dokumentasi dan alat yang digunakan adalah studi dokumentasi serta melakukan wawancara sebagai data pendukung data sekunder digunakan untuk memperjelas data sekunder. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan, terdapat perbedaan mengenai perlindungan debitor di Indonesia dan di Amerika. UUK PKPU belum memberikan perlindungan hukum secara proposional antara debitor dan kreditor. Hukum kepailitan di Amerika menunjukkan untuk memaksimalkan nilai *On-going business*, hukum kepailitan Amerika mengedepankan debitor agar dapat menjalankan bisnisnya sehingga hak kreditor terpenuhi.

UUK PKPU tidak mengatur mengenai insolvensi tes sebelum adanya putusan pailit, hal tersebut menyebabkan solvabilitas debitor tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pailit debitor, sehingga membuka peluang debitor solven dapat dipailitkan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa perlindungan debitor di Indonesia belum diberikan secara prosional, berbeda dengan di Amerika yang tidak hanya mengedepankan hak kreditor namun juga mengedepankan agar usaha debitor tetap berjalan.

Hakim dalam memutus perkara permohonan pailit mengacu pada syarat yang diatur dalam Undang-Undang tanpa mempertimbangkan *solvabilitas* debitor.

**Kata Kunci** : Debitor, Insolvensi tes, Pailit.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi S2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ([merindafebi@mail.ugm.ac.id](mailto:merindafebi@mail.ugm.ac.id)).

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Dosen Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ( [tata\\_wijayanta@ugm.ac.id](mailto:tata_wijayanta@ugm.ac.id) )

**COMPARATIVE STUDY OF DEBTOR PROTECTION IN INSOLVENCY  
(STUDY COURT DECISION No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST  
TELKOMSEL INDONESIA DAN CASE NO. 02-13533 (AJG) IN RE  
WORLD.COM., ET AL SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK AMERIKA  
SERIKAT)**

Berna Merinda Febi<sup>3</sup>, Tata Wijayanta<sup>4</sup>

**ABSTRAC**

This study aims to find out and analyze debtor protection in Indonesian bankruptcy law when compared to American bankruptcy law and to analyze and analyze judges in overcoming legal vacuums related to test insolvency.

This research is normative legal research supported by interviews with informants. The data used is secondary library materials. The method used is the documentation method and the tools used are documentation studies and conducting interviews as supporting data for secondary data used to clarify secondary data. Data were analyzed by qualitative analysis.

The results of research and discussion, there are differences regarding the protection of debtors in Indonesia and in America. The PKPU Law has not provided proportional legal protection between debtors and creditors. Bankruptcy law in America shows that in order to maximize the value of On-going business, American bankruptcy law prioritizes debtors to be able to run their business so that creditors' rights are fulfilled.

The PKPU Law does not regulate the insolvency test prior to a bankruptcy decision, this causes the debtor's solvency not to be considered by the judge in deciding the debtor's bankruptcy, thereby opening up the opportunity for a solvent debtor to be bankrupt

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that protection for debtors in Indonesia has not been given on a professional basis, in contrast to America, which does not only prioritize creditor rights but also prioritizes so that the debtor's business continues.

The judge in deciding cases for bankruptcy petitions refers to the conditions stipulated in the law without considering the debtor's solvency.

**Keywords** : Debtor, Insolvency Test, Bankruptcy.

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Studi S2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ([merindafebi@mail.ugm.ac.id](mailto:merindafebi@mail.ugm.ac.id)).

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Dosen Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ( [tata\\_wijayanta@ugm.ac.id](mailto:tata_wijayanta@ugm.ac.id) )